

PROFIL WKSBM DI KECAMATAN TANETE RIATTANG (Studi Kasus di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan)

Suyanto dan Bambang Pudjianto

ABSTRAK

Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) adalah sarana pelayanan kesejahteraan sosial di tingkat akar rumput yang terdiri atas usaha kelompok, lembaga maupun jaringan pendukungnya. Sarana ini dapat berupa jejaring kerja kelembagaan sosial komunitas lokal baik yang tumbuh melalui proses alamiah atau tradisional maupun lembaga yang sengaja dibentuk dan dikembangkan oleh pemerintah pada tingkat lokal, sehingga lembaga yang terbentuk tersebut dapat mensinergikan pelaksanaan tugas-tugas di bidang usaha kesejahteraan sosial. Sesuai dengan definisi di atas, maka sasaran identifikasi ini terdiri dari: (1) Perkumpulan sosial yang tumbuh dari komunitas lokal atau yang ditumbuhkan dari pihak luar yang berada di komunitas lokal (desa/kelurahan); (2) Memiliki nilai dan norma sosial hingga organisasi sosial (budaya lokal), meliputi adat istiadat, tradisi dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat.

Gambaran mengenai profil WKSBM di Wilayah Kecamatan Tanete Riattang adalah sebagai berikut: (1) WKSBM sudah ada dan berkembang di masyarakat lebih dari 10 tahun; (2) Jumlah kelompok WKSBM di tiap-tiap desa rata-rata diatas 50 kelompok perkumpulan; (3) WKSBM yang ada dibentuk dan tumbuh ditengah-tengah masyarakat sebagai upaya pengintegrasian masyarakat dalam rangka mempertahankan kondisi ketahanan masyarakat dan pada umumnya memiliki kriteria keanggotaan menempati atau berdomisili pada wilayah tertentu; (4) Kegiatan WKSBM kebanyakan bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dengan cara meningkatkan kesejahteraan anggotanya yang dibiayai dengan iuran anggotanya sendiri; (5) Kegiatan WKSBM dijiwai semangat kebersamaan yang intinya ingin membantu orang lain dan kegotong royongan.

I. PENDAHULUAN

Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) merupakan kelembagaan kemasyarakatan berupa perkumpulan sosial terbentuk karena inisiatif masyarakat setempat maupun karena adanya suatu intervensi dari organisasi sosial atau pemerintah. Perkumpulan tersebut memiliki aturan berupa nilai dan norma yang menjadi acuan untuk mengatur anggota kelompok dan keberadaan aturan atau nilai dan norma tersebut dipertahankan secara bersama-sama di tingkat komunitas lokal (perkumpulan). WKSBM diprediksikan semakin banyak jumlah dan ragamnya sesuai dengan kebutuhan komunitas yang membentuknya. Sehubungan dengan hal tersebut program pembangunan kesejahteraan sosial perlu merespon terjadinya perubahan masyarakat. Pemekaran wilayah misalnya akan membawa konsekuensi semakin bertambahnya kebutuhan penduduk atau masyarakat akan perlunya sarana pelayanan sosial, ekonomi, politik dan lainnya termasuk perlindungan terhadap perubahan sosial dan ekonomi yang

terjadi sebagai akibat perkembangan wilayah tersebut.

Kita tahu bahwa ketika kondisi perekonomian nasional dalam keadaan normal, kebijaksanaan pembangunan lebih diarahkan pada paradigma pembangunan yang mengandalkan pada pertumbuhan ekonomi. Ketika itu pendekatan pembangunan kesejahteraan yang digunakan adalah *residual approach* yakni pelayanan sosial diberikan manakala permasalahan sosial sudah muncul. Gaya pendekatan seperti itu menyebabkan pembangunan kesejahteraan sosial yang diemban Departemen Sosial terkesan *charity* dan terlambat. Setelah mengalami krisis ekonomi sejak tahun 1997 menyebabkan sumber daya moneter menjadi terbatas, akibatnya anggaran yang disediakan untuk Departemen Sosial juga terbatas pula.

Menyadari kondisi tersebut, penyelenggaraan atau pelaku pembangunan kesejahteraan sosial dalam kerangka ini perlu mengembangkan wacana dan pemikiran tentang "*think globally, act locally*". Pemikiran

membantu dalam merancang strategi penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial yang mampu menjawab permasalahan dan kebutuhan bangsa maupun tuntutan dunia. Sehubungan dengan itu berbagai konsep pembangunan sosial yang berkembang perlu dipahami dengan benar oleh para pelaku pembangunan kesejahteraan sosial. Hal tersebut yang perlu dikembangkan adalah pembangunan yang berpusat pada masyarakat atau yang dikenal dengan istilah *people centered development* (PCD). Dalam program ini partisipasi masyarakat, demokratisasi, *civil society* dan *social welfare for all* menjadi perhatian pemerintah. Salah satu strategi pemerintah dalam konsep pendekatan PCD adalah pemberdayaan masyarakat terutama yang menjadi sasaran pelayanan sosial adalah Perkumpulan Sosial, dimana perkumpulan sosial tersebut memiliki nilai dan norma yang dikenal dengan sebutan sebagai Pranata Sosial karena mengatur kehidupan anggota perkumpulan tersebut. Kenyataannya perkumpulan sosial merupakan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang ada di komunitas lokal.

Seperti diketahui bahwa setiap perkumpulan sosial memiliki aturan dan eksis perkumpulan sosial tersebut dapat dikatakan sebagai wadah atau tempat untuk memberikan pelayanan sosial. Dalam pembangunan kesejahteraan sosial, berkembang pemikiran bahwa pembangunan yang demokratis hanya dapat diwujudkan dari lapisan bawah (*grassroots*). Demokrasi lokal atau pada *grassroot level* ini mampu mendorong terwujudnya demokrasi di tingkat nasional. Oleh karena itu para pelaku pembangunan kesejahteraan sosial sangat berkepentingan untuk mengembangkan *civil society* sebagai instrumen untuk mewujudkan pembangunan masyarakat yang demokratis, berkeadilan sosial.

Di Indonesia, *civil society* bisa berwujud dalam bentuk organisasi pelayanan sosial, perkumpulan sosial, lembaga swadaya masyarakat/LSM, dunia usaha, perguruan tinggi, perkumpulan atau institusi yang tumbuh pada komunitas lokal sebagai kearifan lokal/budaya/adat istiadat. Dengan demikian *civil society* bisa disebut sebagai perkumpulan sosial yang didalamnya juga terdapat Pranata Sosial atau aturan berupa nilai dan norma yang bersifat lokal. Perkumpulan sosial atau wahana

kesejahteraan sosial ada yang berbentuk formal dan informal. Perkumpulan sosial formal biasanya dibentuk atas prakarsa kebutuhan pelayanan yang biasanya keberadaannya sudah berbentuk organisasi/kelompok masyarakat dan kelompok masyarakat tersebut terbentuk biasanya karena intervensi dari pihak luar dan didukung pemerintah daerah bahkan sampai di tingkat pusat atau organisasi yang besar yang bertaraf nasional dan bahkan internasional. Sedangkan Perkumpulan sosial informal dibentuk atas prakarsa warga masyarakat setempat berdasarkan atas nilai-nilai yang berbau lokal dan memiliki norma-norma yang masih berlaku secara lokal.

Seiring dengan perkembangan pembangunan dan perubahan sosial, ekonomi dan politik di Indonesia, tidak tertutup kemungkinan berpengaruh pada keberadaan perkumpulan sosial tersebut. Adanya desentralisasi yang dikenal dengan otonomi daerah, banyak program-program pembangunan yang menyentuh sendi kehidupan dan penghidupan masyarakat di era reformasi dan globalisasi ini. Sentuhan program pembangunan tersebut tentunya secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap keberadaan dan eksistensi kelembagaan di masyarakat, termasuk kearifan lokalnya. Kearifan lokal secara turun temurun dipatuhi dan dijadikan pedoman hidup bagi warga masyarakat tertentu di pedalaman hal ini masih tampak nyata apabila kita pergi ke daerah pedalaman. Perubahan pola hidup masyarakat kearah modernisasi merupakan salah satu contoh yang tidak dapat dihindari kehadirannya di tengah-tengah masyarakat.

Daerah perkotaan relatif cukup tersedia sarana dan prasarana sosial ekonomi, tingkat heterogenitas penduduk yang beragam, kebutuhan dan persaingan hidup antar penduduk yang relatif tajam. Di daerah perkotaan keberadaan suatu perkumpulan sosial sangat dibutuhkan dan dibentuk untuk mengatasi permasalahan sosial ekonomi. Sedangkan di daerah pedesaan yang masih hidup dalam kerukunan dan kebersamaan juga sudah ada semacam perkumpulan sosial untuk mengatasi permasalahan sosial ekonomi. Sedangkan pada lokasi komunitas adat terpencil atau daerah pedalaman dimana masyarakatnya masih sangat homogen dan hidup dari kemurahan alam, yang belum banyak tersentuh oleh teknologi karena letaknya

yang jauh dari pusat kota kecamatan, kelembagaan sosial yang terbentuk belum tampak ada karena mereka masih mengacu pada adat budaya setempat yang merupakan kearifan lokal, termasuk juga agama yang dianut.

Pusat Pengembangan Ketahanan Sosial Masyarakat Departemen Sosial yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengembangkan ketahanan sosial masyarakat sebagai salah satu elemen untuk memperkokoh ketahanan nasional, perkumpulan sosial merupakan salah satu wadah untuk mencapai tujuan tersebut. Melalui lembaga sosial kemasyarakatan atau perkumpulan sosial program ketahanan sosial masyarakat dapat diwujudkan seiring semakin menyusutnya keberadaan pekerja sosial masyarakat.

Sesuai dengan Indikator Ketahanan Sosial Masyarakat yaitu perlindungan sosial terhadap kelompok rentan, miskin dan penyandang masalah sosial, partisipasi sosial masyarakat dalam organisasi sosial, pengendalian terhadap konflik sosial dan kearifan lokal dalam memelihara sumber daya alam dan sosial, program pengembangan ketahanan sosial masyarakat difokuskan. Perkumpulan sosial dalam hal ini cukup berperan penting untuk mensukseskan program ketahanan sosial masyarakat tersebut.

Untuk lebih memudahkan dan meng-efektifkan program tersebut, sebaiknya mengetahui keberadaan perkumpulan sosial yang ada di masyarakat, terutama pada komunitas lokal. Data dan informasi mengenai keberadaan perkumpulan sosial ternyata belum tersedia secara memuaskan.

Oleh karena itu Pusat Pengembangan Ketahanan Sosial Masyarakat Departemen Sosial melakukan kajian untuk mengidentifikasi Perkumpulan sosial pada komunitas lokal di Kota Bone tepatnya di daerah Kecamatan Tanete Riattang.

Sebagaimana kita ketahui bahwa Program Keluarga Sejahtera yang dimotori oleh BKKBN, kemudian Program IDT pelaksanaannya dikembangkan Bappenas. Sedangkan Departemen Sosial RI sendiri mempunyai tugas dan tanggung jawab mengenai PROKESOS. Program kesejahteraan sosial yang telah dilaksanakan untuk mengatasi masalah kemiskinan semenjak REPELITA III namanya Bimbingan dan Pembangunan

Kesejahteraan Masyarakat serta Usaha Swadaya Sosial Masyarakat (BPKM-USSM). Setelah Departemen Sosial berdiri lagi Program kesejahteraan sosial oleh Direktorat Pemberdayaan, Departemen Sosial RI mulai mengembangkan pembangunan yang berpusat pada masyarakat atau yang dikenal dengan istilah PCD. Pemberdayaan yang terpusat pada masyarakat ini terutama ditujukan kepada pembinaan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat, namun dalam pelaksanaannya ternyata baru dalam tahap uji coba pendataan. Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam meningkatkan ketahanan sosial masyarakat. Karena dari berbagai studi menunjukkan bahwa peranan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat sangat besar dalam pembangunan masyarakat. Masyarakat tergerak untuk berpartisipasi dengan cara partisipasi itu dilakukan melalui perkumpulan yang sudah dikenalnya atau yang sudah ada di tengah-tengah masyarakat. Sebaliknya pelaksanaan suatu kegiatan ditingkat masyarakat akan kurang berhasil secara optimal bila mana tidak melibatkan dan memperhitungkan keberadaan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat. Peran aktif kelompok lokal lebih jauh lagi dapat memfasilitasi persatuan nasional dan mengakomodasi tuntutan berbagai kelompok untuk partisipasi, berpolitik dan pengaturan diri yang lebih mandiri.

Wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat adalah sistem kerjasama pelayanan kesejahteraan sosial di tingkat akar rumput yang terdiri atas usaha kelompok, lembaga maupun jaringan pendukungnya. Wahana ini dapat berupa jejaring kerja kelembagaan sosial komunitas lokal baik yang tumbuh melalui proses alamiah dan tradisional maupun lembaga yang sengaja dibentuk dan dikembangkan oleh pemerintah pada tingkat lokal, sehingga lembaga yang terbentuk tersebut dapat mensinergikan pelaksanaan tugas-tugas di bidang usaha kesejahteraan sosial. Sesuai dengan definisi Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat di atas, maka sasaran identifikasi dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Perkumpulan sosial yang tumbuh dari komunitas sendiri atau yang ditumbuhkan dari pihak luar yang berada di komunitas lokal (kelurahan).

2. Aparat pemerintah kelurahan/tempat perkumpulan sosial berdomisili dan melaksanakan kegiatan sosial.
3. Nilai sosial budaya lokal, yang meliputi adat istiadat, tradisi dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat.

Meskipun beberapa studi berhasil menunjukkan peran aktif dan memberi kontribusi Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial, namun demikian sampai saat ini belum tersedia adanya data tentang keberadaan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat, baik dalam jumlah, bentuk dan *typology* atau model-model kegiatannya.

Pada tahun 1997/1998 dengan terjadinya krisis moneter dan berkembang menjadi krisis ekonomi, masalah kemiskinan kembali meningkat; karena banyak penduduk jatuh kembali ke dalam kemiskinan. Pada bulan April 1998 menurut BPS jumlah penduduk miskin bertambah menjadi 79,4 juta jiwa atau 33,9% dari seluruh penduduk yang jumlahnya mencapai 202 juta (Kepala BPS, Sigitto Soewito, MA).

Dalam kaitan ini Departemen Sosial RI melalui pembangunan Kesejahteraan Sosial telah sejak REPELITA IV melaksanakan pengentasan kemiskinan sesuai dengan amanat konstitusi yang dikenal dengan Program Kesejahteraan Sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (PROKESOS KUBE). Sedangkan secara nasional pengentasan kemiskinan melalui kegiatan Program Keluarga Sejahtera, Program IDT, PROKESOS KUBE serta Program Pendidikan dan Latihan serta program terkait lainnya. Program-program tersebut merupakan bagian dari 3 (tiga) kelompok kebijaksanaan pembangunan yang luas (Laporan terpadu PROKESRA 1997).

PROKESOS pada dasarnya adalah program pengentasan kemiskinan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial melalui pendekatan kelompok warga atau keluarga binaan sosial yang telah dibina melalui proses kegiatan untuk melaksanakan kegiatan kesejahteraan sosial dan usaha ekonomi produktif (UEP) dalam semangat kebersamaan sebagai sarana untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosial.

Secara kuantitas jumlah perkumpulan sosial yang didalamnya terdapat aturan atau merupakan tatanan/pranata sosial atau yang dikenal dengan sebutan WKSMB ada di semua wilayah Tanete Riattang yang terbagi ke 8 wilayah kelurahan namun sejauh mana data dan program WKSMB tersebut belum diperoleh informasi. Disamping itu bagaimana metode dan teknik pemberdayaan masyarakat tersebut dapat dilaksanakan, yang mungkin sudah dilihat secara internal pada program implementer perlu diinventarisasi dan dievaluasi sebagai masukan bagi pengembangan program pemberdayaan dimasa-masa yang akan datang, oleh sebab itu Pusat Ketahanan Sosial Masyarakat Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial pada awal tahun 2006 mulai mencoba mengadakan kegiatan mengidentifikasi profil Pranata sosial yang berupa perkumpulan atau WKSMB dan kegiatan WKSMB dalam pembangunan kesejahteraan sosial karena dipandang perlu untuk dilakukan penelitian.

Pranata sosial menurut Paulus Wirotomo (2004) mengutip definisi Selo Soemartjan adalah sebagai kumpulan nilai dan norma yang mengatur suatu bidang kehidupan manusia. Sedangkan Pranata Sosial di ditinjau dari segi kebudayaan melalui pendekatan *ethnoscience* atau *cognitive anthropology* diartikan sebagai pola bagi tindakan dan tingkah laku manusia yang dilakukan pada suatu tempat. Dengan demikian pengertian pranata sosial juga dapat disebut sebagai kebudayaan karena pranata sosial berisikan seperangkat pengetahuan manusia yang berupa sistem nilai-nilai, resep-resep, *blue-print*, dan norma-norma serta aturan-aturan yang terdapat di dalam kepala manusia sebagai pengetahuan kebudayaan, yang diperoleh melalui proses belajar dalam kehidupan sosialnya, dan digunakan serta dijadikan pedoman tindakan tingkah lakunya, dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, serta digunakan untuk memahami, memanipulasi dan memanfaatkan sumber daya yang ada di lingkungan hidupnya.

Pranata sosial ini bila diartikan secara sempit ada yang berbentuk formal dan informal. Pranata sosial formal biasanya dibentuk atas prakarsa kebutuhan pelayanan yang biasanya keberadaannya didukung pemerintah daerah bahkan sampai di tingkat pusat atau organisasi besar yang bertaraf nasional dan

bahkan internasional. Pranata sosial informal dibentuk atas prakarsa warga masyarakat setempat berdasarkan atas etnis tertentu, agama, profesi, kebutuhan warga masyarakat tertentu. Oleh karena itu dalam beberapa tahun terakhir ini Departemen Sosial RI sudah mulai mengarahkan program-programnya pada strategi pemberdayaan masyarakat yang memperhatikan keberadaan pranata sosial dengan cara melibatkan perkumpulan sosial dengan nama Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat. Pembangunan kesejahteraan sosial secara nasional memandang kemiskinan sebagai suatu masalah yang perlu mendapat penanganan serius karena menurunkan martabat kemanusiaan. Demikian juga dalam kerangka pembangunan kesejahteraan sosial, kemiskinan merupakan suatu akar dari masalah kesejahteraan sosial lainnya, walaupun terdapat banyak masalah kesejahteraan lain yang berkaitan erat dengan masalah kemiskinan.

Setelah Departemen Sosial berdiri lagi Program kesejahteraan sosial oleh Direktorat Pemberdayaan, Departemen Sosial RI mulai mengembangkan pembangunan yang berpusat pada masyarakat atau yang dikenal dengan istilah *People Centered Development (PCD)*. Pemberdayaan yang terpusat pada masyarakat ini terutama ditujukan kepada pembinaan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat, namun dalam pelaksanaannya ternyata baru dalam tahap pendataan. Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam meningkatkan ketahanan sosial masyarakat. Karena dari berbagai studi menunjukkan bahwa peranan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat sangat besar dalam pembangunan masyarakat. Masyarakat tergerak untuk berpartisipasi dengan cara partisipasi itu dilakukan melalui perkumpulan yang sudah dikenalnya atau yang sudah ada di tengah-tengah masyarakat. Sebaliknya pelaksanaan suatu kegiatan ditingkat masyarakat akan kurang berhasil secara optimal bila mana tidak melibatkan dan memperhitungkan keberadaan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat. Peran aktif kelompok lokal ini lebih jauh lagi dapat memfasilitasi persatuan nasional dan mengakomodasi tuntutan berbagai kelompok untuk partisipasi, berpolitik dan pengaturan diri yang lebih mandiri.

Secara kuantitas jumlah WKSMB ada disemua Lokasi Kelurahan yang ada di Wilayah Kecamatan Tanete Riattang ada sejumlah 531 perkumpulan atau WKSMB. Namun sejauh mana data dan program WKSMB tersebut belum diperoleh informasi. Disamping itu bagaimana metode dan teknik pemberdayaan masyarakat tersebut dapat dilaksanakan, yang mungkin sudah dilihat secara internal pada program implementer perlu diinventarisasi dan dievaluasi sebagai masukan bagi pengembangan program pemberdayaan dimasa yang akan datang, oleh sebab itu Pusat Ketahanan Sosial Masyarakat Badan Pelatihan Dan Pengembangan Sosial pada awal tahun tahun 2006 mengadakan kegiatan mengidentifikasi profil dan kegiatan WKSMB dalam pembangunan kesejahteraan sosial karena dipandang perlu untuk dilakukan penelitian selanjutnya.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan partisipatif. Adapun sifat penelitiannya adalah deskriptif kualitatif dengan pokok bahasannya adalah hasil pelaksanaan pendataan program pemberdayaan untuk WKSMB/perkumpulan sosial yang bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial dan bantuan pemberian pelayanan bagi masyarakat melalui pendekatan kelompok swadaya masyarakat di tingkat desa/kelurahan. Fokus telaahan pada kondisi WKSMB, struktur organisasi, sumber dana, kondisi tenaga, pelaksanaan pemberdayaan dan manfaat atau keberhasilan usaha dalam meningkatkan ketahanan sosial masyarakat di lingkungannya.

Pemilihan sampel lokasi ditentukan secara purposif berdasarkan adanya program yang menjadi sasaran penelitian yang telah melaksanakan kegiatan usaha kesejahteraan sosial. Adapun sampel lokasi terpilih yakni di 8 kelurahan yang berlokasi di Kecamatan Tanete Riattang. Pemilihan responden juga ditentukan secara purposif dan jumlah responden sebanyak 58 orang dengan rincian: pengurus perkumpulan 16 orang; 8 orang atau aparat kelurahan 2 orang dari unsur pemerintah daerah dan 32 orang dari anggota kelompok perkumpulan.

Tujuan penelitian untuk mengidentifikasi pelaksanaan WKSMB yang sebagian besar adalah bentukan warga yang tumbuhnya dari

masyarakat lokal. Selain itu juga ingin mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan, sehingga program dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Teknik pengumpulan data menggunakan tiga cara yakni: (a) wawancara, (b) studi dokumentasi dan (c) observasi. Analisa menggunakan analisa kualitatif dalam mendiskripsikan kondisi kelompok.

Ada lima aspek yang menjadi perhatian dalam pengkajian ini, lima aspek tersebut adalah: (1) aspek identitas perkumpulan sosial atau wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat; (2) aspek keanggotaan; (3) aspek sumber daya dan dana; (4) aspek program dan kegiatan lembaga; dan (5) aspek jaringan kerja.

III. HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Pranata Sosial Di Lokasi Kajian

Sebagaimana disebutkan bahwa lokasi kajian ini diadakan di satu lokasi kecamatan yang ada di Wilayah Kabupaten Bone tepatnya di Kecamatan Tanete Riattang. Kecamatan Tanete Riattang sebelum tahun 1999 merupakan kecamatan yang hanya memiliki 13 desa. Namun dengan adanya pemekaran setelah tahun 1999 Kecamatan Tanete Riattang juga mengalami pemekaran yang terbagi dalam 3 kecamatan yakni, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kecamatan Tanete Riattang Induk dan Kecamatan Tanete Riattang Barat. Kecamatan Tanete Induk selain merupakan pemekaran juga mengalami pemekaran desa yang tadinya hanya 5 desa menjadi 8 kelurahan.

Lokasi Kajian di Kecamatan Tanete Riattang dengan ibu kota Kecamatan Salekoe. Di Kecamatan Tanete Riattang kepadatan penduduknya mencapai 1.788 per km² lebih tinggi dari pada kecamatan-kecamatan lainnya yang ada di Kabupaten Bone. Hal ini disebabkan Kecamatan Tanete Riattang merupakan pusat kota perdagangan kota Kerajaan Bone.

1. Sejarah Lokasi Kajian.

Kabupaten Bone sejak tahun 1999 di era otonomi daerah sebagai kabupaten yang terus menerus mengembangkan visi

dan misi pembangunannya guna mencapai tujuan kesejahteraan seluruh masyarakatnya sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Selanjutnya Kecamatan Tanete Riattang juga mengalami pemekaran menjadi tiga kecamatan, yakni Kecamatan Tanete Riattang Barat, Tanete Riattang Induk dan Tanete Riattang Timur. Kecamatan Tanete Riattang merupakan salah satu kecamatan yang terletak di ibu kota Kabupaten Bone mengalami pemekaran dimulai dari pemekaran desa yang tadinya ada 13 desa, setelah pemekaran wilayah masing-masing kecamatan memiliki 8 desa/kelurahan.

2. Keadaan Topografi

Dimuka dijelaskan bahwa luas Kecamatan Tanete Riattang hanya 23,39 km² atau hanya 0,52 persen dari luas wilayah Kabupaten Bone. Dari luas wilayah tersebut hanya sebagian kecil lahan yang digunakan sebagai lahan pertanian penduduk, untuk lahan sawah, lahan pertanian kering, perkebunan, selebihnya adalah lahan pemukiman.

Keadaan topografi di Kecamatan Tanete Riattang jauh berbeda dengan keadaan topografi dengan kecamatan lainnya yang ada di Kabupaten Bone yakni, terdiri dari kawasan pemukiman dan perdagangan.

3. Sarana Perhubungan/Transportasi

Keadaan Jalur Perhubungan/transportasi, di wilayah Kecamatan Tanete Riattang dari wilayah kelurahan yang ada jika ingin pergi ke ibu kota kecamatan masyarakatnya dapat menggunakan jalur darat dengan kendaraan ojek dan kendaraan roda empat, dengan kondisi jalan sangat baik. Mobilitas penduduk juga sudah sangat tinggi, dikarenakan jasa transportasi penduduk di semua wilayah kelurahan umumnya sudah sangat mudah dengan biaya yang cukup murah. Selain itu wilayah Kecamatan Tanete

Riattang merupakan daerah perdagangan dan pemukiman.

4. Sarana Fasilitas Umum dan Lembaga Sosial

Pembangunan yang demokratis hanya dapat dibangun dari lapisan bawah (*grassroots*), karena itu, pembangunan kesejahteraan sosial sangat berkepentingan dalam mengembangkan warga masyarakat (*civil society*) sebagai instrumen dalam pembangunan masyarakat yang demokratis yang berkeadilan, dan berkejahteraan sosial.

Di Indonesia *civil society* dapat berbentuk organisasi pelayanan sosial, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi, perkumpulan dan organisasi atau instansi yang tumbuh pada komunitas lokal, institusi atau perkumpulan yang tumbuh pada komunitas lokal tersebut telah menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial, yang dilandasi oleh tradisi dengan keunikan dan nilai sosial budaya lokal. Berbagai bentuk perkumpulan sosial lokal dengan jaringan yang terbangun antara mereka, kemudian institusi atau perkumpulan tersebut disebut sebagai Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM).

Berbagai studi menunjukkan bahwa peranan WKSBM sangat besar dalam pembangunan masyarakat. Masyarakat akan tergerak untuk ikut berpartisipasi jika partisipasi itu dilakukan melalui perkumpulan yang sudah dikenal atau sudah ada ditengah-tengah masyarakat. Sebaliknya pelaksanaan suatu kegiatan di masyarakat akan kurang berhasil apabila tidak melibatkan dan memperhitungkan keberadaan perkumpulan sosial. Peran aktif kelompok sosial lokal ini lebih jauh dapat memfasilitasi dan mengakomodasi tuntutan berbagai kelompok untuk partisipasi politik dan pengaturan diri yang lebih mandiri. Di pihak lain, meskipun beberapa hasil studi berhasil menunjukkan peran dan kontribusi perkumpulan sosial dalam pembangunan kesejahteraan sosial, namun demikian sampai saat ini belum tersedia data tentang keberadaan WKSBM, baik dalam jumlah, bentuk dan

tipologi atau model-model kegiatannya. Untuk itu Pusat Pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial mencoba mengidentifikasi kegiatan WKSBM dalam pembangunan kesejahteraan sosial di Kecamatan Tanete Riattang.

Masyarakat yang mendiami wilayah Kecamatan Tanete Riattang sudah memiliki akses, walaupun dapat dikatakan kurang memadai. Terhadap fasilitas sosial, ekonomi, kesehatan, transportasi dan fasilitas lainnya juga dapat dikatakan sangatlah terbatas walaupun fasilitas tersebut keberadaannya berada di dalam wilayah kecamatan. Untuk bidang pendidikan, masyarakat sudah bisa menggunakan sampai Sekolah Lanjutan Atas. Dalam Bidang kesehatan sudah menggunakan Puskesmas sebagai tempat berobat. Dalam bidang kerohanian/keagamaan masyarakat juga sudah menggunakan tempat ibadah seperti masjid. Dalam pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat sudah menggunakan pasar, warung dan pedagang kaki lima /pedagang keliling. Fasilitas tersebut sebagai tempat transaksi, baik untuk hasil pertanian maupun untuk membeli kebutuhan pokok mereka sehari-hari.

B. Identitas Kelembagaan Perkumpulan Sosial di Lokasi Daerah Penelitian

Dimuka telah diuraikan mengenai peran perkumpulan sosial yang menunjukkan bahwa peranan perkumpulan sosial tersebut dapat dikatakan sangat besar dalam pembangunan masyarakat. Karena masyarakat akan tergerak untuk ikut berpartisipasi jika partisipasi itu dilakukan melalui perkumpulan yang sudah dikenal atau sudah ada ditengah-tengah masyarakat. Sebaliknya pelaksanaan suatu kegiatan di masyarakat akan kurang berhasil secara optimal apabila tidak melibatkan dan memperhitungkan keberadaan pranata sosial/perkumpulan sosial. Peran aktif kelompok sosial lokal ini lebih jauh dapat memfasilitasi dan mengakomodasi tuntutan berbagai kelompok untuk partisipasi politik dan pengaturan diri yang lebih mandiri. Di pihak lain, meskipun beberapa hasil studi berhasil menunjukkan peran dan kontribusi pranata sosial dalam pembangunan kesejahteraan sosial, namun demikian sampai

saat ini belum tersedia data tentang keberadaan pranata sosial, baik dalam jumlah, bentuk dan tipologi atau model-model kegiatannya. Untuk itu Pusat Pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial mencoba mengidentifikasi kegiatan Pranata sosial dalam pembangunan kesejahteraan sosial di Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone.

Dari hasil identifikasi di wilayah Kecamatan Tanete Riattang ternyata sudah ada akses mengenai pranata sosial, walaupun dapat dikatakan kurang memadai, karena selain sangat terbatas. Terhadap fasilitas sosial, ekonomi, kesehatan, transportasi dan fasilitas lainnya dapat dikatakan sangatlah memadai. Untuk bidang pendidikan, masyarakat sudah bisa menggunakan sampai Sekolah Lanjutan

Atas, namun kalau mau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi juga bisa namun di lain Kecamatan yang letaknya tidak jauh dengan wilayah kajian, karena masih dalam satu wilayah ibu kota kabupaten. Dalam Bidang kesehatan sudah menggunakan Rumah Sakit (Poliklinik), Puskesmas dan sudah banyak praktek dokter sebagai tempat berobat. Dalam bidang kerokhaniaan/keagamaan masyarakat sudah menggunakan tempat ibadah seperti masjid, gereja dan juga ada pura, wihara. Dalam pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat sudah menggunakan pasar, toko mini market, warung, pedagang kaki lima dan pedagang keliling. Untuk lebih jelasnya mengenai fasilitas umum tersebut dapat dikemas dalam bentuk tabel seperti di bawah ini:

Tabel : Fasilitas Umum, Perkumpulan Sosial Kecamatan Tanete Riattang Tahun 2006

No	Jenis Fasilitas	Kelurahan								Jumlah
		Biru	Masumpu	Ta'	Manurunge	Watambone	Bukaka	Walenna	Papolo	
(1)	(2)									
1	Pasar	-	-	-	-	1	1	-	-	2
2	Warung	1	35	-	-	19	8	-	-	63
3	Koperasi	-	1	-	1	1	1	-	-	4
4	KUBE	-	-	1	-	-	1	-	-	2
5	Kukesra	-	-	4	-	-	-	-	-	4
6	K. Tani	9	1	-	-	1	4	1	4	20
	Agama									
7	Masjid	10	6	9	12	9	6	3	5	60
8	Pengajian	1	1	3	2	4	17	2	1	31
9	KUA	-	-	1	-	-	-	-	-	1
10	Shalawat	-	-	-	-	-	6	-	-	6
	Pendidikan									
11	TPA	4	-	1	4	1	-	-	-	10
12	TK	3	1	1	2	6	1	-	1	15
13	SD	7	-	4	7	5	3	2	2	30
14	SLTP	1	-	-	-	3	-	-	-	4
15	SLTA	2	-	-	-	-	-	-	-	2
16	Ibtidaiyah	-	-	-	-	1	2	-	1	4
17	Tsanawiyah	1	-	-	1	-	-	-	1	3
18	PT	1	-	2	-	-	-	1	-	4
	Pranata Sosial									
19	Arisan	9	1	-	3	1	3	-	-	17
20	PKK	2	1	1	10	1	4	8	1	28
21	Dasawisma	11	-	11	8	-	11	8	-	49
22	Siskamling	11	3	6	3	1	-	4	-	28
	Panti									
23	Karang Taruna	1	1	1	-	1	-	1	1	6
24	LPM/BPD	1	1	1	1	1	1	1	1	8
25	Jimpitan	11	-	-	-	-	-	-	-	11
	Kesehatan									
26	Puskesmas	1	1	-	-	-	-	-	-	2
27	Posyandu	3	2	3	4	4	4	2	2	24
28	Dokter	3	1	3	8	3	2	-	-	20
29	Perawat	5	9	10	16	24	7	4	3	78
30	Bidan	2	4	4	8	6	5	6	4	16
31	Dukun	1	-	-	2	1	1	1	2	8
32	P. OR	4	-	-	-	4	-	-	-	8
	Jumlah	100	64	48	77	64	69	34	22	531

Data lapangan di Kecamatan Tanete Riattang, 2006

Dari pendataan diperoleh 531 kelompok perkumpulan yang ada di masyarakat. Terhimpun dalam 32 jenis kelompok yang dikategorikan dalam WKSBM. Dari data tersebut juga diketahui bahwa perkumpulan sosial terbentuk karena adanya kepentingan/kebutuhan masyarakat kelompok-kelompok tersebut biasanya dimulai dari tingkat Rukun Tetangga, kelompok Rukun Warga, Lingkungan dan kelompok PKK. Semua kelompok tersebut dibentuk atas keinginan anggota untuk memenuhi kebutuhan. Tujuan pembentukan kelompok ada bermacam-macam sesuai kebutuhan masyarakat dalam upaya meningkatkan ketahanan sosial masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan warganya. Masing-masing perkumpulan atau kelompok sosial memiliki identitas yang berbeda yang dapat diuraikan satu persatu sesuai dengan tujuan didirikannya lembaga sosial tersebut.

Jenis perkumpulan di atas paling banyak adalah kelompok Rukun Tetangga (RT), diikuti kelompok PKK, Pengajian dan Majelis Ta'lim, Pemuda dan Siskamling. Keadaan ini menunjukkan bahwa ikatan kelompok berdasar pada "kewilayahan" yaitu Rukun Tetangga dan "kepentingan/kebutuhan bersama dalam kelompok kecil" seperti Rukun Tetangga, PKK, Pengajian, majelis Ta'lim dan lain sebagainya.

Sedangkan jika dilihat dari tujuan pembentukan kelompok ada bermacam-macam, yakni: untuk meningkatkan kesejahteraan, peningkatan pendapatan, integrasi masyarakat dan untuk memenuhi kepentingan atau kebutuhan lainnya. Keadaan ini menguatkan anggapan bahwa perkumpulan/kelompok tersebut dibentuk oleh masyarakat dengan tujuan untuk memenuhi kepentingan/kebutuhan bersama anggotanya.

C. Keanggotaan

Keanggotaan perkumpulan sosial hasil kajian adalah jumlah anggota, kriteria anggota dan syarat menjadi anggota.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua responden mengetahui jumlah anggotanya dengan pasti dan kriteria anggota kelompoknya. Dari data yang ada pada 32 jenis perkumpulan tersebut ternyata jumlah anggota lebih dari 20 orang yaitu dari kelompok rukun tetangga dan kelompok pengajian. Sedangkan untuk kelompok ekonomi yang ada di pasar tidak bisa diketahui

secara pasti karena pasar merupakan pranata ekonomi yang merupakan tempat belanja bagi masyarakat siapa saja dan tidak terikat pada tempat tinggal dan asal, pasar sifatnya umum dan anggotanya tidak terikat dan terdaftar. Sedang kelompok yang berang-gotakan kurang 20 orang terbanyak adalah dasawisma, karena kelompok ini dibentuk dengan anggota kelompok paling banyak adalah 10 anggota dengan kriteria dari keluarga yang memiliki ciri khas tertentu.

Syarat menjadi anggota kelompok perkumpulan sosial ternyata sebagian besar (91,52%) atau sebanyak 486 kelompok mengatakan tidak memiliki syarat khusus, syarat yang ada hanyalah menempati wilayah dimana mereka menjadi anggota, warga setempat. Sedangkan sebagian kecil kelompok untuk menjadi anggota suatu kelompok yang mensyaratkan anggotanya berdasarkan pada suatu syarat tertentu misalnya pendidikan, profesi dan sebagainya sebesar 8,48 % atau sebanyak 45 kelompok.

Dari perkumpulan kelompok sosial yang menyatakan tidak memiliki persyaratan untuk menjadi anggota kelompok sosial ternyata terbanyak dari anggota kelompok dari Rukun Tetangga, PKK dan Dasawisma. Keadaan ini menunjukkan bahwa untuk menjadi anggota kelompok tidak dituntut persyaratan yang berat, kriteria anggota kelompok cukup berdomisili/bertempat tinggal di wilayah tertentu. Karena perkumpulan ini dibentuk oleh masyarakat sehingga persyaratan keanggotaannya dan kepengurusannya diatur sendiri oleh kelompok tersebut berdasarkan kesepakatan bersama. Dalam menentukan periode kepengurusan pun paling banyak adalah kurang dari 5 tahun sebesar 91,52% atau sebanyak 486 kelompok; lainnya selama periode 6 – 10 tahun sebanyak 25 atau sebesar 4,71% diikuti selama lebih dari 10 tahun sebanyak 20 kelompok atau sebesar 3,77%. Terhadap jawaban pertanyaan yang menjawab terhadap kepengurusan kelompok dipegang atau dijabat lebih dari 10 tahun ini menunjukkan bahwa kepengurusan tersebut memiliki masa kerja yang tidak ditentukan/tidak tentu. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan perkumpulan masih sangat sederhana dan belum mengacu pada aturan-aturan yang jelas, biasanya masih berdasarkan saling percaya dan menghormati yang tua, sehingga yang ditunjuk sebagai ketua atau pengurus kelompok adalah

tokoh yang disegani atau dianggap tua, tanpa melihat kemampuan untuk mengelola perkumpulan. Perkumpulan seperti ini biasanya masih sangat konvensional, tradisional dan berjalan berdasar pada kebiasaan-kebiasaan yang telah dijalani, tanpa ada upaya pengembangan baik program maupun kegiatannya.

D. Sumber Daya

Sumber daya dari perkumpulan sosial dari hasil kajian yang dapat diuraikan ada dua yakni: sumber daya manusia dan sumber dana. Sumber daya manusia dapat dilihat dari segi pendidikan dan usia. Dari segi pendidikan anggota masing-masing perkumpulan responden menjawab lebih dari satu tingkat/jenjang pendidikan dimana yang terbanyak adalah tingkat pendidikan yang ditamatkan adalah SLTA kemudian diikuti yang berpendidikan SLTP dan Sekolah Dasar. Sedangkan dari segi usia anggota masing-masing perkumpulan memiliki anggota yang terbanyak berusia antara 19 – 39 tahun sebesar (63,02%) atau sebanyak 334 anggota dan yang berusia 40 – 60 tahun ada sebanyak 196 orang atau sebesar 36,98%. Ini menunjukkan bahwa potensi tersebut dapat dikembangkan untuk meningkatkan kinerja perkumpulan.

Jika dilihat dari sumber dana masing-masing kelompok memiliki sumber dana dari iuran anggota dan dari sumbangan masyarakat sekitar, ini menunjukkan bahwa kemauan anggota berkorban untuk kelangsungan kegiatan kelompoknya cukup besar.

E. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan kelompok/ perkumpulan sosial tidak dapat disajikan dalam bentuk data angka karena jawaban yang diperoleh semuanya dari pertanyaan terbuka dan jawabannya sangatlah beragam. Namun program dan kegiatan perkumpulan tersebut kebanyakan selaras dengan jenis kelompoknya. Kegiatan yang dilakukan kelompok/ perkumpulan tersebut terbanyak adalah kegiatan arisan, simpan-pinjam dan kegiatan keagamaan. Kegiatan tersebut dilakukan seperti kelompok PKK, Dasawisma, Rukun Warga, Rukun Tetangga, arisan, paguyuban baik dusun maupun lingkungan rata-rata mempunyai kegiatan arisan dan simpan-pinjam sebagai pengikat dan bahan pertemuan kelompok.

Hampir semua program dan kegiatan yang dilakukan perkumpulan sosial ditujukan untuk mensejahterakan anggota dengan cara mengutamakan pelayanan kebutuhan anggota dari pada kebutuhan orang yang memerlukan namun bukan anggota kelompok. Hal ini dikarenakan keterbatasan sumber daya, sarana yang dimiliki perkumpulan-perkumpulan sosial tersebut. Meskipun demikian dapat dikatakan hampir semua program dan kegiatan telah menunjukkan upaya-upaya penanganan masalah sosial dengan metoda "case work" dan "group work". Jika kita telusuri perkumpulan-perkumpulan tersebut telah memiliki konsep dasar pekerjaan sosial, hanya saja mereka tidak menyadari dan tidak tahu apa yang harus dikerjakan dan bagaimana cara pengembangannya.

F. Nilai-Nilai Sosial Budaya

Dari berbagai kepentingan atau kebutuhan dan persoalan yang dirasakan oleh masyarakat menumbuhkan keinginan kelompok untuk memecahkan kepentingan secara bersama-sama. Berbagai kepentingan itu berupa kebutuhan dasar manusia, seperti kebutuhan untuk hidup, kebutuhan rasa aman, kebutuhan aktualisasi diri dan sebagainya. Keinginan untuk memecahkan kepentingan/ kebutuhan merupakan masalah yang perlu diselesaikan melalui pembentukan perkumpulan sosial yang tujuannya antara lain, untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Keinginan untuk memecahkan masalah secara bersama-sama ini bersumber pada nilai-nilai kebersamaan yang dimiliki dan dikembangkan di tengah masyarakat dan merupakan kebiasaan masyarakat sejak jaman nenek moyangnya. Nilai-nilai tersebut antara lain, hasrat membantu orang lain yang sedang kesusahan, kepercayaan untuk saling pinjam-meminjam barang atau uang, menyampaikan informasi atau berita yang baik atau buruk, duka maupun suka, gotong royong dan lain sebagainya. Hasil kajian mengenai nilai-nilai sosial budaya tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: dari data yang diperoleh dari hasil kajian menunjukkan bahwa sebagian besar responden mengatakan nilai solidaritas perlu dipertahankan dengan cara membantu warga/ anggota perkumpulan yang memiliki persoalan, nilai-nilai solidaritas diberikan/dilakukan melalui kegiatan gotong royong. Jawaban tersebut

membuktikan bahwa kelompok/perkumpulan sosial sungguh-sungguh dijiwai oleh nilai-nilai yang bertujuan untuk membantu orang lain melalui kegiatan gotong royong. Keadaan ini merupakan potensi kesetiakawanan sosial yang dapat dikembangkan sebagai potensi dan sumber kesejahteraan sosial sebagai wahana untuk meningkatkan ketahanan sosial di tingkat lokal dengan tanpa menunggu uluran tangan dari pemerintah.

G. Jaringan Kerja

Dari hasil kajian dilokasi pendataan dapat diketahui bahwa wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat dapat dikatakan belum tampak adanya jaringan kerja antar kelompok/perkumpulan sosial yang ada, kecuali kelompok-kelompok yang terbentuk karena adanya intervensi dari pemerintah. Sebagai contoh program pemberdayaan melalui pembentukan kelompok ekonomi produktif (KUBE) yang sebagian telah membentuk jaringan kerja, namun jaringan kerja itu masih terbatas dengan kelompok sejenis. Jaringan kerja yang dimaksud tidak dapat diuraikan secara rinci karena data yang diperoleh dalam penelitian ini tidak lengkap karena waktu yang dipergunakan sangatlah terbatas, namun secara garis besarnya dapat digambarkan sebagai berikut: dari hasil pendataan kurang dari 50% atau sebanyak 258 kelompok sosial jaringan kerja terbentuk karena adanya bantuan dari kelompok atau lembaga lain atau merupakan kegiatan berjenjang dari tingkat Rukun Tetangga sampai kabupaten atau propinsi contohnya kelompok PKK. Jaringan kerja bentukan pemerintah biasanya berupa jaringan sejenis vertikal (berjenjang) seperti kelompok RT, RW, PKK. Sedangkan yang horizontal seperti kelompok pengajian, kesenian, kelompok, dan kelompok arisan.

Sebagian kegiatan bertumpu pada sumber-sumber lokal maka keberadaan kelompok-kelompok bentukan masyarakat lebih diwarnai dengan dukungan lokal, kebanyakan sumber-sumber yang digalipun lebih banyak pada intern anggota mereka atau donatur yang merasa terikat oleh kewajiban moral. Dukungan dari pemerintah terhadap perkumpulan sosial masih sangat terbatas pada perkumpulan bentukan masyarakat yang diprakarsai oleh pemerintah setempat.

H. Pembinaan Kelompok

Langkah-langkah pembinaan untuk memberikan motivasi dan melatih tenaga kerja atau dalam memberikan jasa nasehat yang diberikan kepada pengurus kelompok sebaiknya terlebih dahulu dikaji agar sesuai dengan kebutuhan dan permintaan anggota kelompok. Tujuan pembinaan ini adalah pelatihan dalam bentuk pengelolaan usaha, pemasaran hasil produksi, penggunaan teknologi dan pengelolaan keuangan. Program pembinaan harus juga ditunjang dengan adanya bahan baku atau alat peragaan.

Berdasarkan hasil penelitian ternyata pembinaan kelompok di Kab. Bone selama ini masih terbatas pada pendataan, hal ini disebabkan Karena program kesejahteraan yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Bone masih tergantung pada Dinas Sosial Tingkat I. (Dinas Sosial Propinsi Sulawesi Selatan). Padahal menurut pejabat dari Dinas Sosial, para pengurus kelompok perlu mendapatkan pembinaan dan bantuan stimulan untuk digulirkan kepada anggota kelompok. Selain itu juga perlu adanya forum komunikasi yang bertujuan untuk komunikasi edukasi dan tukar informasi antar kelompok sosial yang sejenis maupun yang heterogen. Dengan pemberian stimulan tersebut, Dinas Sosial memiliki wewenang untuk memonitor kegiatan dan penggunaan dana bagi kelompok sosial dengan cara mengadakan pendataan dan mengidentifikasi kegiatan kelompok sosial yang ada. Selain itu Dinas Sosial Tingkat II bisa melaksanakan pembinaan dengan alasan mengadakan monitoring penggunaan dana yang telah diberikan kepada kelompok sosial.

I. Manfaat Kelompok Sosial bagi Anggota

Manfaat yang dirasakan antar anggota kelompok dapat dilihat dari segi ekonomi dan sosial. Dari segi sosial adalah meningkatnya rasa kebersamaan dan kegotong royongan satu dengan yang lainnya sedangkan manfaat dari segi ekonomi adalah adanya fasilitas untuk mendapatkan pinjaman baik barang, uang maupun tenaga. Hal ini dikarenakan jenis kelompok sosial yang mereka ikuti berbeda juga karena ketrampilan anggota untuk mengemban kelompok juga berbeda.

Selain memiliki manfaat ekonomi, dilihat dari segi sosial tampak meningkatnya kemampuan berorganisasi dan bertambahnya teman. Disamping itu pengetahuan anggota kelompok juga meningkat seiring dengan seringnya mengikuti pertemuan yang diadakan untuk membahas persoalan dan hambatan yang timbul dalam kegiatan yang dilaksanakan secara rutin.

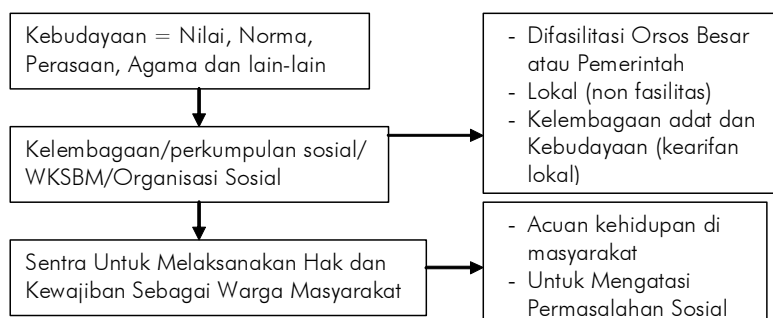
Dengan kondisi pranata sosial yang ada dan adanya sarana (fasilitas umum) yang demikian di wilayah Kecamatan Tanete Riattang dapat dikatakan sudah cukup memadai, karena wilayah ini tidak memiliki permasalahan sosial yang cukup kompleks. Permasalahan dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut:

Jenis PMKS
Kecamatan Tanete Riattang, Tahun 2006

No	Jenis PMKS	Kelurahan								Jumlah
		Biru	Masumpu	Ta'	Manurunge	Watam pone	Bukaka	Walenna	Papolo	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Anak Terlantar	-	-	-	-	-	-	6	-	6
2	Anak Nakal	-	18	-	-	-	-	10	-	28
3	Anak Cacat	13	2	1	-	29	-	6	1	52
4	Wanita Rawan Sosial Ekonomi	-	474	-	-	-	-	38	-	512
5	Lanjut Usia Terlantar	-	1	-	-	-	-	6	-	7
6	Penyandang Cacat	1	-	4	9	-	-	2	-	16
7	Cacat Bekas Penyakit Kronis	1	13	1	-	-	-	-	-	15
8	Napsa	-	-	-	-	-	-	3	-	3
9	Eks Napi	5	-	1	5	-	-	5	-	16
10	Keluarga Fakir Miskin	-	127	-	237	6	231	147	-	748
11	Rumah Tidak layak Huni	30	-	-	49	-	15	17	-	111
12	Keluarga Bermasalah Psikologi	-	-	-	-	-	-	6	-	6
Jumlah		50	635	7	300	35	246	246	1	1520

Data merupakan permasalahan sosial yang dapat ditemukan di Wilayah Kecamatan Tanete Riattang.

Bagan WKSBM di Kecamatan Tanete Riattang



IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. WKSBM di Kecamatan Tanete Riattang sudah ada dan berkembang di masyarakat lebih dari 10 tahun.
2. Jumlah kelompok WKSBM di tiap desa rata-rata di atas 50 kelompok perkumpulan.
3. WKSBM yang ada dibentuk dan tumbuh di tengah-tengah masyarakat sebagai upaya pengintegrasian masyarakat dalam upaya mempertahankan kondisi ketahanan masyarakat dan pada umumnya memiliki kriteria keanggotaan menempati atau berdomisili pada wilayah tertentu.
4. Kegiatan WKSBM kebanyakan bertujuan untuk meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dengan cara meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui iuran anggota.
5. Kegiatan WKSBM diwarnai dan dijiwai oleh semangat ingin membantu orang lain dan kegotong royongan

Keadaan ini menunjukkan bahwa di masyarakat telah tersedia wahana atau potensi yang dapat dimobilisasi untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Namun masih memerlukan beberapa sentuhan intervensi dari pemerintah dalam hal peningkatan kualitas sumber daya manusia, manajemen pelayanan kesejahteraan sosial serta penggalan sumber dana.

B. Saran

Peran Kelompok Sosial saat ini sudah diakui oleh pemerintah daerah, mengingat kegiatan-kegiatan nyata yang dilakukan sangat membantu terlaksananya program pembangunan terutama dalam menciptakan ketahanan sosial.

Peluang dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan masih sangat luas mengingat kompleksnya permasalahan dan jumlah serta luas wilayah golongan ekonomi lemah masih sangat banyak. Tinggal bagaimana pemerintah menyikapi hal itu agar program-program yang dilakukan kelompok-kelompok sosial yang ada di daerah mendapatkan dukungan dari pemerintah secara penuh dan dapat dimanfaatkan sebagai pendamping program peningkatan kesejahteraan sosial yang ada di daerah-daerah. Untuk itu pemerintah perlu memperhatikan kelemahan-kelemahan yang ada di daerah dengan cara:

1. Memberikan pelatihan bagi pengurus kelompok sosial.
2. Perlu memberikan bantuan stimulan untuk digulirkan kepada anggota kelompok sosial yang ada.
3. Perlu dibentuk forum yang tujuannya untuk membentuk wadah/sarana komunikasi, edukasi dan memberikan informasi antar kelompok sosial di tingkat lokal baik untuk kelompok yang sejenis maupun yang heterogen.
4. Perlu adanya *monitoring* dari pemerintah dalam bentuk pendataan dan pengidentifikasian kelompok sosial yang ada di daerah kekuasaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Syarwani dan Meuthia Gani Rochman. 1992, *Pembangunan Swadaya Nasional*, Jakarta, LP3ES.
- Akib Yusuf. 2003, *Potret Manusia Kajang*, Makasar, Pustaka Refleksi.
- Anonim. 1997, *Peranan Program Kesejahteraan Sosial Dalam Penanggulangan Kemiskinan Melalui KUBE*, Jakarta, Dit. Bin Bansos.
- 1998, *Menteri Sosial RI Pada Sidang Kabinet terbatas Memantapkan Program Menghapus Kemiskinan*, Jakarta.
- 2003, *Pola Penanggulangan Kesejahteraan Sosial Menteri Sosial RI*, Jakarta.

- Dorojatun Kuntjoro-Yakti. 1996, *Kemiskinan di Indonesia*. Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.
- Florus, Paulus, et.al. 1994, *Kebudayaan Dayak Aktualisasi dan Transformasi*. Jakarta, LP3S-IDRD dengan PT.Grasindo.
- Korten, David.C, 1982, *Pembangunan Berpusat Pada Rakyat*. Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.
- Larso, Wursito. 1995, *Pemerataan Pembangunan Antara Harapan dan Kenyataan*. Solo, Bergetar.
- Maryanto, 1996, *Peran Masyarakat Dalam Mewujudkan Ekonomi Rakyat Lewat Jaringan*. Solo, Bergetar.
- Midgley, James, 2005, *Pembangunan Sosial Perspektif Pembangunan Dalam Kesejahteraan Sosial, Diperta Islam Departemen Agama*, Jakarta.
- Muhammd, Rusdin. 1993, *Kelembagaan Desa Sebagai Wadah Partisipasi Masyarakat*. Solo, Bergetar.
- Nurdin dan Suradi. 2004, *Penelitian Peranan Organisasi Lokal Dalam Pengembangan Masyarakat, Jurnal Penelitian dan Pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial, Vol.9, No.01, Puslitbang UKS, Balatbang, Departemen Sosial*.
- Prastiwi, Ety. 1993, *Wanita Dalam Peranannya Sebagai Kader Pembangunan dan Ibu Rumah Tangga*. Solo, Bergetar.
- Samin, M.Yamin. 2005, *Manusia, Kebudayaan dan Pembangunan di Sulawesi Selatan*, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prop. Sulawesi Selatan.
- Saransi, Ahmad. 2003, *Tradisi Masyarakat Islam di Sulawesi Selatan*, Makasar, LPPTM.
- Sutopo HB. 1993, *Konsep Pembangunan Swadaya Masyarakat Dalam Pembangunan Pedesaan Ditinjau Dari Sudut Sosiologi Pembangunan Antara Peluang dan Tantangan*. Solo, Bergetar.
- Twikromo, Argo. 1993, *Pembangunan Masyarakat dan Pembangunan Kepemimpinan Kelompok*. Solo, Bergetar.
- Wardani, Nila. 1993, *Sebuah Bentuk Dampungan Bagi Wanita Pekerja Industri Rumah Tangga*. Solo, Bergetar.
- Wirotoomo, Paulus, 2004, *Makalah Konstruksi Jaring Pranata Sosial Untuk Penguatan Ketahanan Sosial (Kerangka Konseptual)*, Jakarta.

BIODATA PENULIS:

1. **Suyanto**, Alumnus Universitas Muhammadiyah Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Tahun 1989, Kini Peneliti Muda pada Pusat Pengembangan Ketahanan Sosial Masyarakat, Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial, Departemen Sosial Republik Indonesia.
2. **Bambang Pudjianto**, menamatkan program S1 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran Bandung dan memperoleh gelar Magister pada Bidang Psikologi Sosial Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada DI Yogyakarta tahun 2000. Selain aktif menulis di media Jurnal dan Informasi Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial juga sebagai Tim Pengelola Jurnal Penelitian dan Pengembangan UKS. Sejak tahun 1995 mulai aktif mengajar pada beberapa perguruan tinggi swasta di Jakarta. Adapun Penelitian yang pernah dilakukan meliputi permasalahan di bidang kesejahteraan sosial dan psikologi sosial.